

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara beriklim tropis yang terletak di garis khatulistiwa serta memiliki lahan terbuka hijau yang subur dan luas. Hal ini dimanfaatkan oleh mayoritas penduduknya untuk bercocok tanam terutama dalam sektor pertanian. Lahan pertanian mempunyai peran dan fungsi strategis sebagai sumberdaya pokok dalam usaha pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor penting dalam suatu negara karena kebutuhan pokok dapat tercukupi dengan memanfaatkan hasil mentah dari sektor pertanian seperti padi yang nantinya akan diolah menjadi beras untuk dikonsumsi sebagai makanan pokok. Beras menjadi komoditas pangan utama yang sangat mempengaruhi ketahanan pangan di Indonesia sehingga ketersediaan stok beras yang dapat disediakan secara nasional menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan (Jaya, 2018).

Padi sebagai hasil sektor pertanian menjadi komoditas pangan tertinggi di Indonesia mengalahkan komoditas pangan lain seperti: jagung, telur, ubi dan sayur. Tingginya produksi padi yang harus dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pangan berkaitan erat dengan tingginya konsumsi beras sebagai makanan pokok sebagian besar masyarakat. Pada tahun 2013, rata-rata konsumsi padi nasional menunjukkan angka sebesar 97,36 kg/kapita . Angka konsumsi beras yang tinggi tidak berbanding lurus dengan angka produksi padi. Hal ini pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap ketahanan pangan, terutama ketahanan pangan pada wilayah penghasil komoditas tersebut. Masyarakat harus memperhatikan ketersediaan padi dan juga akses pangan

yang ada di suatu wilayah agar wilayah tersebut mampu disebut sebagai wilayah yang tahan pangan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Fauzi (2019) yang menyatakan bahwa, setiap orang harus memiliki aksesibilitas fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan agar hidup sehat dan produktif.

Ketahanan pangan akan berkaitan dengan kemampuan pemenuhan pangan setiap individu dalam rumahtangga. Semakin banyak anggota rumahtangga maka kebutuhan pangan akan semakin meningkat. Oleh karena itu, rumahtangga merupakan salah satu objek terpenting dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional ataupun komunitas dan individu. Banyak masyarakat yang masih belum memahami pentingnya memenuhi pangan secara mandiri sehingga, membangun kapasitas dan kemandirian masyarakat merupakan tantangan utama dalam mendukung ketahanan pangan di tingkat rumahtangga. Ketahanan pangan suatu wilayah dapat dikategorikan berhasil apabila peningkatan produksi dan distribusi pangan berjalan lancar serta konsumsi pangan aman dan berkecukupan untuk memenuhi gizi masyarakatnya. Pemenuhan pangan akan berkaitan dengan kesesuaian antara produksi sektor pertanian dengan kebutuhan pangan masyarakatnya. Produksi komoditas pangan di suatu wilayah bergantung pada seberapa luas panen pada tahun yang bersangkutan (Purwaningsih, 2016).

Peningkatan jumlah penduduk dapat mempengaruhi aspek ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan berhubungan dengan luas lahan sawah, luas lahan panen, luas tanam dan produktivitas padi. Ketersediaan komoditas pangan dengan kebutuhan konsumsi beras harus seimbang. Jumlah penduduk pada suatu wilayah juga sangat berpengaruh terhadap ketersediaan pangan agar dapat tercapai keseimbangan. Apabila

angka ketersediaan beras lebih rendah dari kebutuhan konsumsi beras, maka wilayah tersebut dapat dikatakan defisit beras dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah (Santosa dan Sudrajat, 2010).

Pangan merupakan hal penting yang harus dipenuhi oleh setiap manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Tercukupinya asupan gizi yang terkandung dalam pangan dan diserap oleh tubuh dapat menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Mengingat pentingnya memenuhi kecukupan pangan, maka setiap negara mendahulukan akan mendahulukan pembangunan ketahanan pangannya sebagai fondasi bagi pembangunan sektor-sektor lainnya. Oleh karena itu, Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan ketahanan pangan dan hal tersebut dituangkan dalam Undang-undang No 18 tahun 2018 tentang pangan. Undang-undang tersebut mendefinisikan ketahanan pangan sebagai suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Berdasarkan definisi tersebut, ketahanan pangan yang dimaksud tidak hanya di tingkat global, nasional dan regional, tapi juga sampai pada tingkat rumah tangga. Ketersediaan pangan nasional dan regional tidak menjamin adanya ketahanan pangan rumah tangga atau individu, karena ketersediaan pangan dan ketahanan pangan ditentukan oleh akses untuk mendapatkan pangan. Dampak dari ketiadaan akses terhadap pangan salah satunya adalah ada beberapa daerah di Indonesia yang mengalami krisis pangan yang mengakibatkan terjadinya kasus kelaparan besar-besaran (Saliem dkk., 2015).

Ketersediaan pangan merupakan salah satu pilar ketahanan pangan suatu rumah tangga dalam mencukupi kebutuhan hidup. Ketersediaan pangan mencakup aspek produksi sehingga dalam hal ini petani berperan penting dalam kegiatan usahatani untuk meningkatkan ketersediaan pangan rumahtangga karena tanpa petani maka lahan-lahan pertanianpun tidak akan ada manfaatnya (Wibowo, 2018).

Ketersediaan pangan rumah tangga dapat dilihat dari ketersediaan pangan bahan pokok yaitu (beras) yang dihasilkan sendiri terhadap kebutuhan pokok keluarga kebutuhan yang dapat dihitung dengan cara membandingkan proporsi pangan pokok yang dihasilkan sendiri terhadap kebutuhan pangan pokok keluarga serta aksesibilitas rumahtangga terhadap pangan dilihat dari kemudahan rumahtangga dalam mendapatkan pangan yang diukur melalui daya beli rumah tangga, semakin tinggi daya beli petani menjadikan tingkat ketahanan pangan menjadi lebih baik (Rahmawati dkk., 2020).

Masalah ketahanan pangan di Indonesia memiliki dua dimensi kepentingan, yakni bagaimana agar masyarakat dapat mengakses pangan dengan harga terjangkau dan di sisi lain bagaimana kesejahteraan petani dapat terlindungi. Hampir setiap tahun, kita disibukkan dengan pro-kontra impor bahan pangan, mulai dari beras, daging sapi, kedelai, hingga bawang merah. Data yang digunakan untuk membuat kebijakan yang bersumber dari instansi resmi negara seringkali tidak sinkron satu sama lain. Apalagi pada tataran perumusan dan eksekusi kebijakannya di lapangan (Hendiawan, 2012).

Masalah-masalah dalam ketahanan pangan sebenarnya tidak lagi sepenuhnya hanya bersumber dari masalah ketersediaan dan akses pasar, tetapi juga termasuk akibat kurangnya kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan yang sehat. Oleh karena itu, masalah penyediaan pangan bisa melalui pendekatan program swasembada pangan, akan tetapi secara empiris masih menimbulkan masalah yaitu sulitnya mempertahankan secara konsisten kebijakan swasembada yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Disamping itu sampai tahap tertentu program swasembada pangan dapat menyebabkan terabaikannya prinsip keunggulan komparatif dan kompetitif dari suatu komoditi tertentu. Oleh karena itu, program swasembada pangan dengan cara substitusi impor akan tetap memerlukan biaya yang besar.

Sulawesi Selatan dengan beragamnya tipe agroekosistem yaitu, agroekosistem pesisir, agroekosistem persawahan dan agroekosistem pegunungan. Selain dari aspek ketersediaan pangan, akses pangan, penyerapan pangan dan status gizi rumahtangga maka kegiatan kearifan lokal juga akan menunjukkan bagaimana rumahtangga dalam mempertahankan dan mengelola pangan rumahtangga. Aspek ini sangat terkait dengan rancangan Undang-Undang Tahun 2012 tentang pangan yang juga mengkaji tentang keyakinan dan kebudayaan masyarakat (Ilsan, 2018).

Tingkat ketahanan pangan suatu daerah diukur melalui indeks ketahanan pangan rumahtanggayang terdiri atas tiga dimensi yaitu ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan (BPS) 2023. Indeks ketahanan pangan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Produksi Komoditas Pangan Provinsi Sulawesi Selatan 2021-2023

No.	Komoditi	Produksi (Ton)		
		2021	2022	2023
1.	Padi	5.090.637	5.341.020	4.943.096
2.	Jagung	1.250.204	1.490.60	1.538.413
3.	Ubi kayu	433.401	478.478	565.958
4.	Ubi jalar	70.767	79.51	71.681

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021-2023.

Berdasarkan Tabel 1, menunjukkan bahwa pertumbuhan produksi pangan Provinsi Sulawesi Selatan yang mengalami peningkatan yaitu dari tahun 2021 jagung berjumlah 1.250.204/ton, tahun 2022 produksi jagung meningkat menjadi 1.490.60/ton, tahun 2023 produksi jagung meningkat menjadi 1.538.413/ton. Komoditas ubi kayu juga mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2021 berjumlah 433.401/ton, tahun 2022 meningkat menjadi 478.478/ton, tahun 2023 meningkat menjadi 565.958/ton. Sedangkan produksi pangan yang mengalami penurunan yaitu padi berjumlah 5.090.637/ton, tahun 2022 padi meningkat menjadi 5.341.020/ton dan tahun 2023 padi menurun menjadi 4.943.096/ton. Komoditas ubi jalar juga mengalami penurunan yaitu pada tahun 2021 berjumlah 70.767/ton, tahun 2022 ubi jalar meningkat menjadi 79.51/ton, tahun 2023 ubi jalar mengalami penurunan menjadi 71.681/ton

Kabupaten Luwu merupakan salah satu wilayah di Sulawesi Selatan yang termasuk wilayah lumbung pangan, terutama pangan strategis, seperti padi, jagung dan umbi-umbian. Namun, demikian wilayah Kabupaten Luwu yang pada tipe

agroekosistem persawahan masih tergolong wilayah rawan pangan akibat dari ketersediaan pangan yang masih kurang.

Tabel 2. Produksi Komoditas Pangan Kabupaten Takalar 2021-2023.

No.	Komoditi	Produksi (Ton)		
		2021	2022	2023
1.	Padi	160.243	194.020	210.100
2.	Jagung	33.000	29.111	42.520
3.	Ubi Kayu	3.330	6.760	9.155
4.	Ubi Jalar	2.150	6.532	8.213

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021-2023.

Berdasarkan Tabel 2, menunjukkan bahwa pertumbuhan produksi pangan Kabupaten Luwu yang mengalami peningkatan yaitu padi, ubi kayu, ubi jalar, kecuali komoditas jagung mengalami penurunan pada tahun 2022.

Berdasarkan uraian di atas dipandang penting untuk melakukan penelitian tentang tingkat ketersediaan pangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi model ketersediaan pangan rumahtangga petani pada tipe agroekosistem persawahan di Desa Samba, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, untuk memperoleh solusi dalam upaya pencapaian peningkatan ketahanan pangan rumahtangga.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana tingkat ketersediaan pangan rumahtangga pada tipe agrosistem persawahan di Desa Samba, Kecamatan Bajo, kabupaten luwu.

- b. Bagaimana model ketersediaan pangan rumahtangga petani pada tipe agroekosistem persawahan di Desa Sampa Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu
- c. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketersediaan pangan rumahtangga petani pada tipe agroekosistem persawahan di Desa Samba, Kecamatan Bajo, kabupaten Luwu

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis tingkat ketersediaan pangan rumahtangga pada tipe agrosistem persawahan di Desa Samba, Kecamatan Bajo, kabupaten luwu.
- b. Menganalisis ketersediaan pangan rumahtangga petani pada tipe agroekosistem persawahan di Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu
- c. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan rumahtangga petani pada tipe agroekosistem persawahan di Desa Samba, Kecamatan Bajo, kabupaten luwu.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Bagi peneliti, menambah wawasan dan pengetahuan terutama yang berkaitan dengan topik penelitian dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pertanian di Universitas Muslim Indonesia.
- b. Bagi pemerintah Kabupaten Luwu, penelitian ini berguna sebagai sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan khususnya yang

berkaitan dengan Analisis Tingkat Ketersediaan Pangan Rumah tangga Petani berdasarkan Skala Usahatani pada Tipe Agroekosistem Persawahan di Kabupaten Luwu.

- c. Bagi pembaca, penelitian ini berguna sebagai wacana dalam menambah pengetahuan mengenai Analisis Tingkat Ketersediaan Pangan Rumah tangga Petani berdasarkan Skala Usahatani pada Tipe Agroekosistem Persawahan di Kabupaten Luwu.
- d. Bagi peneliti lain, sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.